

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena modul yang sudah lama digagas ini akhirnya selesai juga disusun dan diterbitkan oleh KPU.

Tujuan diterbitkannya modul ini adalah sebagai bahan dan sarana untuk memberikan informasi kepada pemilih agar mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam proses penyelenggaraan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu.

Modul ini tidak hanya menjelaskan pentingnya pemilu dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga menggambarkan bagaimana pemilu itu dilaksanakan, termasuk didalamnya gambaran singkat pelaksanaan dan hasil pemilu yang dimulai pertama kali tahun 1955 sampai dengan pelaksanaan terakhir di tahun 2009.

Modul ini juga berisi informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Informasi mengenai pengawasan dan pemantauan pemilu serta peran serta pemilih dalam pemilu diharapkan juga memberikan dan memperkaya pengetahuan pemilih sehingga dapat menjadi pemilih yang cermat dan cerdas.

Modul ini merupakan satu kesatuan, dari 3 (tiga) seri modul yaitu modul pertama dengan judul "Pemilu untuk Pemula", modul ke dua "Siap Menjadi Pemilih" dan modul ketiga "Memilih dengan Cermat dan Cerdas." Ketiga seri modul ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, yang juga dapat dipergunakan untuk fasilitator bagi pemilih pemula pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun buku ini. Usaha untuk menyusun modul ini patut mendapatkan apresiasi khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.



Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jakarta, November 2010

Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, M.A

Pengantar Penyusun Modul I

Tujuan modul ini adalah sebagai panduan bagi pemilih untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana proses Pemilu dilaksanakan. Modul ini berisi bahan informasi bagi pemilih (Voters Information) yang sangat penting diketahui oleh masyarakat, seperti mengapa Pemilu dilaksanakan, manfaat Pemilu, dan sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai buku panduan, modul ini dapat digunakan oleh para pemilih pemula, fasilitator pelatihan, serta anggota masyarakat pada umumnya. Modul ini merupakan satu kesatuan yang diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu, yang juga dapat dipergunakan untuk fasilitator pemula dan masyarakat pada umumnya.

Modul ini disusun berdasarkan keperluan bagi pemilih pemula untuk memahami Pemilu. Mengapa Pemilih Pemula? Karena Pemilih Pemula sangat penting mengingat jumlah mereka yang cukup signifikan yaitu berkisar 20 % dari seluruh pemilih, dan dinilai sangat potensial. Pemilih pemula yang masih duduk di bangku SMP dan SMU perlu diberi prioritas disamping pemilih lainnya. Mereka perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pemberian informasi yang akurat dan pengetahuan yang memadai.

Modul ini disusun dengan sederhana agar mudah dipahami dan dibaca baik oleh pemilih pemula maupun anggota masyarakat. Tema-tema yang terangkum dalam materi modul ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dalam Pemilu, sehingga aspirasi masyarakat dapat menjadi sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis untuk terwujudnya sebuah pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Metode yang digunakan didalam mengaplikasikan buku modul ini berupa: simulasi, diskusi kelompok, ceramah, *ice breaking*, *sharing* kelompok, pleno atau diskusi paripurna, dan *brainstorming*.

Mudah-mudahan buku modul ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2010

Tim Penyusun



BAB I PEMILU DAN DEMOKRASI

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Pengertian Pemilu
- B. Manfaat Pemilu
- C. Sistem Pemilu

Waktu : 1 Jam

Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:

- 1. Simulasi
- 2. Diskusi dan pemaparan Kelompok
- 3. Ceramah
- 4. Pleno atau Diskusi Paripurna



Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu :

- 1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
- 2. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
- 3. Adanya perlindungan terhadap HAM.
- 4. Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.

A. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

B. Manfaat Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

C. Sistem Pemilu.

Dalam ilmu politik dikenal beberapa sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada prinsip pokok, antara lain:

I. Sistem Distrik

Sistem distrik biasa disebut juga *single-member constituency* (tetapi ada juga yang memakai istilah *single-member-district* untuk menyebut sistem ini). Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan (distrik) yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan demikian, satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik akan menjadi wakil rakyat terpilih, sedangkan kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit, suaranya tidak akan diperhitungkan atau dianggap hilang—sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada—sehingga dikenal istilah *the winner-takes-all*.

Kelebihan sistem distrik antara lain:

- a. Karena kecil atau tidak terlalu besarnya distrik maka biasanya ada hubungan atau kedekatan antara kandidat dengan masyarakat di distrik tersebut. Kandidat mengenal masyarakat serta kepentingan yang mereka butuhkan.
- b. Sistem ini akan mendorong partai politik untuk melakukan penyeleksian yang lebih ketat dan kompetitif terhadap calon yang akan diajukan untuk menjadi kandidat dalam pemilihan.
- c. Karena perolehan suara partai-partai kecil tidak diperhitungkan, maka secara tidak langsung akan terjadi penyederhanaan partai politik. Sistem dwipartai akan lebih berkembang dan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih stabil.

Kekurangan sistem distrik, antara lain:

- a. Sistem ini kurang representatif karena perolehan suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan sama sekali atau suara tersebut dianggap hilang.
- b. Partai-partai kecil atau golongan/kelompok minoritas/termarginalkan yang memperoleh suara yang lebih sedikit tidak akan terwakili (tidak memiliki wakil) karena suara mereka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, kaum perempuan memiliki peluang yang kecil untuk bersaing mengingat terbatasnya kursi yang diperebutkan.

- c. Wakil rakyat terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan rakyat di distriknya dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain.

2. Sistem Proporsional

Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya.

Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilihan.

Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.

Kelebihan sistem proporsional antara lain:

- a. Menyelamatkan suara masyarakat pemilih dimana suara kandidat yang lebih kecil dari kandidat yang lain tetap akan diperhitungkan sehingga sedikit suara yang hilang.
- b. Memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih sedikit tetap memiliki wakil di parlemen karena suara mereka tidak otomatis hilang atau tetap diperhitungkan.
- c. Memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu.

Kekurangan sistem proporsional antara lain:

- a. Sistem ini cenderung menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit terwujudnya pemerintahan yang stabil.
- b. Biasanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara emosional. Pemilih tidak atau kurang mengenal kandidat, dan kandidat juga tidak mengenal karakteristik daerah pilihannya, masyarakat pemilih dan aspirasi serta kepentingan mereka. Kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai politik sebagai saluran yang mengusulkan mereka. Pada akhirnya nanti, kandidat yang terpilih mungkin tidak akan memperjuangkan dengan gigih kepentingan pemilih karena tidak adanya kedekatan emosional tadi.

3. Sistem Campuran (Distrik dan Proporsional).

- a. Menggabungkan 2 (dua) sistem sekaligus (distrik dan proporsional)
- b. Setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui proporsional.
- c. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.